

BAB II

TINJAUAN UMUM JUMLAH UANG BEREDAR DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO RIIL DI INDONESIA

2.1. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Krisis nilai tukar yang terjadi dikawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia bukan lagi fenomena yang bersifat sementara. Hampir semua kalangan dan bagian kehidupan bangsa merasakan dampak dari turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis mata uang yang bukan hanya menyangkut permasalahan ekonomi tetapi juga menyangkut masalah instabilitas politik yang membawa perubahan besar dalam perekonomian Indonesia. Krisis ini tidak akan menjadi lebih parah seandainya Indonesia mempunyai struktur ekonomi yang kuat, dan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*) yang dapat diminimalkan.

Proyeksi perekonomian nasional diprediksi akan terus diwarnai dengan kebijakan moneter yang ketat. Kenaikan harga kebutuhan barang-barang pokok sebagai akibat apresiasi dollar AS terhadap rupiah telah memancing laju inflasi yang pada tahun 1996 dapat ditekan sekitar 6,5%. sejak tahun 1980 tercatat telah dua kali angka inflasi menembus angka satu digit, yaitu tahun 1980 sebesar 15,97% dan pada tahun 1983 sebesar 11,96%. Dua kali juga tercatat angka inflasi dibawah 5% yaitu pada tahun 1985 sebesar 4,31% dan pada tahun 1992 sebesar 4,94%.

Persoalan ekonomi tidak kalah seriusnya adalah defisit transaksi berjalan. Menurut perhitungan bank dunia didukung juga oleh perhitungan pemerintah, angka

defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan defisit pada tahun 1995/1996 yaitu sebesar US\$ 6,9 milyar, meningkat menjadi US\$ 9,788 milyar pada tahun 1997/1998. Upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus keinginan untuk mendinginkan suhu ekonomi adalah dua hal yang sangat kontradiktif. Artinya jika pertumbuhan ekonomi menjadi acuan, maka memanasnya suhu perekonomian adalah suatu hal yang dapat diperhitungkan sejak awal. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang wajar jika suhu perekonomian meningkat. Tingginya tingkat suku bunga merupakan kosekuensi dari tingkat inflasi yang tinggi diikuti dengan kenaikan defisit transaksi berjalan (Handayani, 2001).

2.2 Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang merupakan tagihan maupun kewajiban Bank Indonesia kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar terutama adalah aktiva luar negeri netto sehingga pemerintah berusaha melakukan sterilisasi penerimaan devisa dari luar negeri akibat ekspor minyak, pinjaman dan bantuan luar negeri dengan cara membelanjakan langsung untuk impor, maupun digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban pada Bank Indonesia yang berarti mengurangi tagihan netto pada pemerintah pusat.

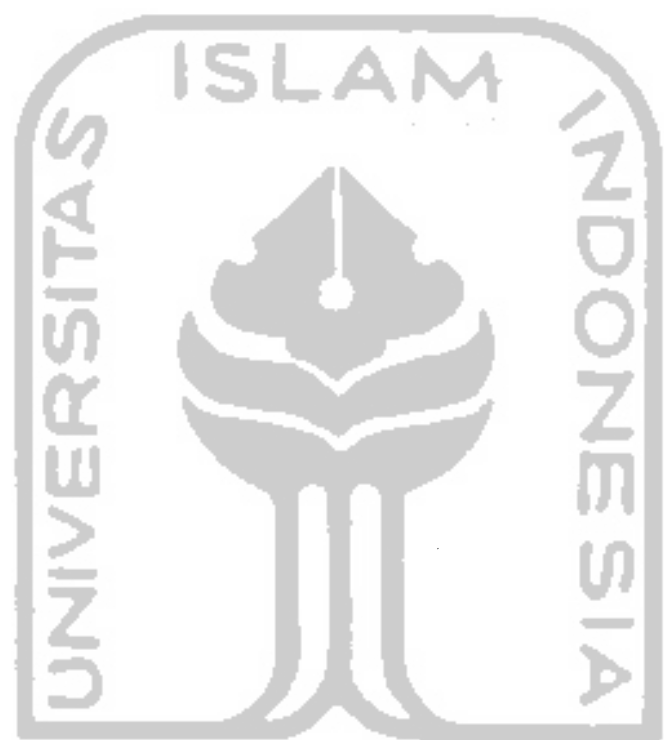
Jumlah uang beredar sangat erat kaitannya dengan tingkat harga umum (GDP Deflator). Peningkatan atau ekspansi jumlah uang beredar akan menyebabkan peningkatan harga umum dan inflasi. Ekspansi jumlah uang beredar sangat besar

kemungkinannya bagi perekonomian Indonesia yang perekonomiannya sangat terbuka dengan peran komoditi minyak bumi dalam ekspor yang sangat dominan dalam penerimaan pemerintah.

Namun demikian kebijaksanaan pengendalian jumlah uang beredar masih tetap diperlukan dalam rangka pengendalian inflasi jangka pendek. Kebijakan pengendalian jumlah uang beredar diarahkan pada terciptanya mekanisme pasar uang yang relatif bebas, sehingga bank sentral sebagai otoritas moneter dalam melaksanakan kebijaksanaan itu hendaknya lebih bertumpu pada kebijaksanaan operasi pasar terbuka, walaupun kebijaksanaan tersebut belum cukup bekerja efektif, tetapi setidaknya dapat dimulai dengan deregulasi perbankan dan penerbitan SBI. Sebelum adanya kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1985, pemerintah menjalankan kebijakan uang ketat. Namun laju pertumbuhan jumlah uang beredar tetap tinggi akibat pengaruh penerimaan minyak dan penerimaan luar negeri.

Pengaruh sektor moneter terhadap jumlah uang beredar melalui pelaksanaan anggaran belanja. Karena pasar uang atau modal di negara berkembang belum maju, maka pinjaman pemerintah akan mempengaruhi jumlah uang beredar, mengingat tidak mungkin pemerintah menjual surat hutang kepada masyarakat. Pemerintah pinjam uang dari bank sentral secara akuntansi pinjaman pemerintah ini muncul sebagai deposito pemerintah secara pasiva neraca bank sentral pada saat yang sama muncul disisi aktiva sebagai tagihan pada pemerintah. Pencairan atau penggunaan dana ini oleh pemerintah akan menaikkan uang inti (cadangan bank umum pada





جامعة الإسلام في إندونيسيا

bank sentral) yang selanjutnya dapat menaikkan jumlah uang beredar (Nopirin, 1992, 172).

Jumlah uang beredar pada akhir kuartal mengalami fluktuasi setiap tahun dan yang sangat rendah pada kuartal terakhir kalender. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan kegiatan perekonomian (industri dan jasa, terutama perbankan). Pada akhir tahun menjelang tutup buku tahunan. Dengan demikian jumlah uang beredar (M1) sangat mempengaruhi tingkat harga umum yang dicerminkan oleh GDP Deflator dan secara tidak langsung mempengaruhi output yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan (Handayani, 2001).

2.3. Perkembangan Produk Domestik Bruto Riil di Indonesia

Derajat moneterisasi perekonomian Indonesia pada masa sebelum orde baru relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari lebih besarnya prosentase peredaran uang kartal dibandingkan uang giral secara keseluruhan.

Selama kurun waktu sepuluh tahun sejak 1985, Indonesia tergolong sebagai salah satu negara Asia yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Tambunan, 1996, 37). Perkembangan perekonomian yang diamati dengan menggunakan angka PDB atas dasar harga konstan dari suatu periode yang menjelaskan kegiatan perekonomian seperti produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia oleh pelaku ekonominya. Hingga saat ini indikator PDB riil masih cukup relevan untuk menyatakan kinerja perekonomian disuatu negara sekalipun beberapa pendapat menyatakan adanya unsur-unsur pemerataan.

Tabel 2.1 berikut ini menggambarkan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia untuk periode 1984-2004

TABEL 2.1

PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA

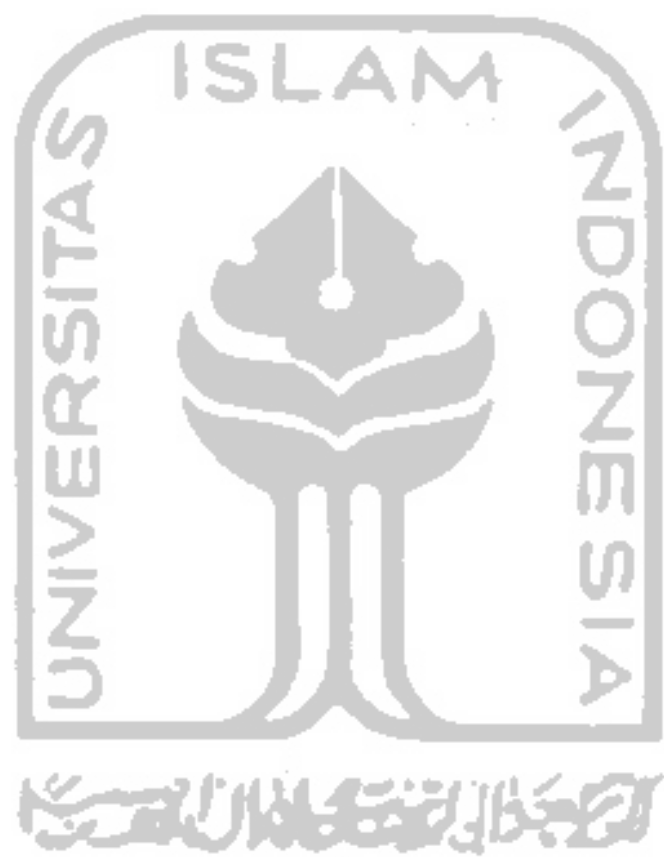
1984-2004

Tahun	Indeks Harga		Produk Domestik Bruto		Δ %
	Inflasi	IHK	Harga Berlaku	Harga Konstan*)	
1984	10,47	49,49	89885	181622,6	10,41
1985	4,73	51,83	94491,5	187144,13	3,04
1986	5,83	54,85	96489,3	197206,2	-3,5
1987	9,30	59,95	124846,9	208201,67	11,22
1988	8,04	64,77	142020,3	237877,66	10,99
1989	6,41	68,92	166324,5	260565,87	12,76
1990	12,49	77,53	195597,2	271979,88	4,38
1991	9,34	84,77	227502,3	291879,08	8,42
1992	7,56	91,18	260786,3	309711,56	5,03
1993	9,67	100,00	329775	329775	6,48
1994	8,48	108,48	382219,7	352341,45	6,84
1995	9,47	118,75	452380,9	382148,63	8,63
1996	10,04	130,67	532568	407567,15	6,48
1997	6,20	138,77	627695,4	458790,16	10,6
1998	48,48	198,47	1002333	373074	-13,3
1999	20,5	202,45	1099731,6	379352	0,92
2000	9,15	221,37	1264918,7	398016,9	4,92
2001	12,55	249,15	1467654,8	411753,5	3,45
2002	10,03	274,13	1808761,6	428947,2	3,69
2003	5,06	109,83	1966224,9	444453,5	320
2004	6,40	116,86	2223982,7	476947,45	6,3

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS), edisi 1984-2004

Keterangan : *) Berdasarkan harga konstan tahun 1993.

: Untuk data tahun 2003 dan 2004, IHK gabungan 45 kota berdasarkan tahun dasar 2002=100



Data yang ditunjukkan pada tabel 2.1 merupakan hasil pengukuran output nasional berdasarkan harga berlaku dan harga konstan serta pertumbuhannya yang dituliskan sebagai perubahan. Deregulasi pada tahun 1987 tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap perubahan kinerja perekonomian hingga awal dekade 1990-an. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 1984 sebesar 10,41% dan tahun 1989 12,76%. Pihak pemerintah dengan serangkaian kebijakan ekonominya masih menginginkan tercapainya asumsi pertumbuhan sebesar 5% seperti yang terjadi pada dekade 1970-an. Namun, upaya ini juga belum mampu menurunkan tingkat inflasi rata-rata dibawah 5% per tahunnya.. Pada tabel 2.1 tingkat inflasi bahkan mendekati angka 10% setelah tahun 1990.

Deregulasi ekonomi tahun 1990 mampu memberikan dampak yang cukup meyakinkan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya kinerja perekonomian nasional yang ditunjukkan melalui indikator PDB riil. Pada tahun 1991, pertumbuhan PDB riil mencapai 10,34% atau meningkat dari sebesar 3,06% pada tahun 1990. Tingkat inflasi juga dapat diturunkan dari sebesar 12,49% pada tahun 1990 menjadi 7,56 % pada tahun 1992. perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berupaya untuk memberikan kelonggaran untuk memperoleh kemudahan modal investasi mampu menurunkan efek pemanasan ekonomi (*over heating*) dengan memberikan keterbukaan bagi masuknya modal asing.

Langkah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi menghadapi kendala setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997. Tingkat pertumbuhan PDB riil terendah terjadi pada tahun 1998 dimana pada tahun tersebut tingkat

pertumbuhannya mencapai minus 9,35%. Upaya untuk merestrukturisasi perekonomian berdasarkan letter of intent dari IMF (International Monetary Fund) hanya memberikan toleransi pertumbuhan sebesar 1,57% pada tahun 1999. Walaupun pertumbuhan PDB riil dapat diperbaiki pada tahun 2000, namun kecenderungannya selalu mengalami penurunan dimana pada tahun 2002 pertumbuhannya hanya mencapai 0,96%.

2.4. Struktur Sistem Keuangan Indonesia

Sistem keuangan di Indonesia menjadi fokus perhatian bagi kebijakan dan para ekonom setelah krisis minyak dunia pada akhir dekade 1970-an (Hill, 1996,164-165). Alternatif untuk membiayai investasi domestik hanya dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan tabungan masyarakat dan sistem perbankan nasional. Langkah ini diawali dengan melakukan perombakan sistem keuangan nasional melalui paket deregulasi pada tahun 1983.

Perkembangan sistem moneter selalu mengikuti kemajuan dan transformasi ekonomi. Negara-negara yang sedang berkembang, prinsip likuiditas sebagai alat pengukur kekayaan cukup dominan seperti uang (kertas maupun logam), dan uang dalam bentuk cek (rekening giro). Trend moneter semacam ini terjadi dinegara-negara sedang berkembang pada dasawarsa 1970-an hingga awal 1980-an. Sebaliknya, dalam perekonomian dimana tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, maka lembaga-lembaga keuangan alat likuiditasnya yang dominan (Oposungu,1998,13)

Tabel 2.2

Perkembangan M1, Uang Kuasi, dan M2 di Indonesia, 1984-2004

Tahun	M1			Uang kuasi			M2		
	Nominal	Riil	% Δ	Nominal	Riil	% Δ	Nominal	Riil	% Δ
1984	8581	17338,9	2,6	9348,1	18888,8	19,8	17887,1	36142,9	10,4
1985	10104	19494,5	12,4	13094,6	25264,5	33,6	23279,2	44914,6	24,3
1986	11677	21289	9,2	16018,5	29204,2	15,6	27724,3	50545,7	12,5
1987	12685	21159	-0,6	21218,9	35394,3	21,2	33825,4	56422,7	11,6
1988	14392	22220,2	5	28120	43415,2	22,7	42748,1	65999,9	17
1989	20114	29184,6	31,3	38214,6	55447,8	27,7	57403,2	83289,7	26,2
1990	23819	30722,3	5,3	55050,6	71005,6	28,1	76731,5	98970,1	18,8
1991	26341	31073,5	1,1	63003,7	74323,1	4,7	85748,7	101154,6	2,2
1992	28779	31562,8	1,6	84718,5	92913,5	25	111828,4	122645,8	21,2
1993	36805	36805	16,6	101570,7	101570,7	9,3	135867,3	135867,3	10,8
1994	45374	41827,1	13,6	118870,4	109578,2	7,9	160532,4	147983,4	8,9
1995	52677	44359,6	6,1	159534,4	134344,8	22,6	209076,4	176064,4	19
1996	64089	49046,5	10,6	202908,4	155283,1	15,6	260958,3	199707,9	13,4
1997	78343	564455,3	15,1	305872,4	220416,8	-11,9	392192,3	282620,4	-41,5
1998	101197	46015,4	-18,5	469055,1	213284,4	-3,2	568796,7	258638	-8,5
1999	124633	47031,3	2,2	494879,2	186746,9	-12,4	613650,2	231566,1	-10,5
2000	162186	56069,3	19,2	574273,1	198531,8	6,3	733652,8	253630,9	9,5
2001	177731	54592,4	-2,6	659476,1	202566,7	2	836302,7	256881,3	1,3
2002	191939	53584,3	-1,8	692305,2	193273,4	-4,6	883896,6	246760,6	-3,9
2003	223799	54667,4	1,9	731893	205357,5	5,8	955692	289852,2	14,8
2004	253818	55352,6	1,2	779709	212456,7	3,3	1033527	303609,8	4,5

Sumber: - Biro Pusat Statistik (BPS), edisi 1984-2004

- Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, 1984-2004

Keterangan: Nilai riil berdasarkan harga konstan 1993.

Laju pertumbuhan rata-rata permintaan uang M2 selama periode 1984 hingga 1996 mencapai 24%, sedangkan M1 sebesar 16,9%. Pertumbuhan M1 pada tahun 1984 mencapai 2,6% sebagai akibat mengalirnya dana-dana tunai ke sektor keuangan seperti perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan uang kuasi menjadi sebesar 33,6% pada tahun 1985 dari 19,8% pada tahun 1984. Jumlah uang beredar dalam bentuk M2 juga mengalami pertumbuhan yang cukup meyakinkan, yaitu sebesar 24,3% pada tahun 1985 dari sebesar 10,04% pada tahun

1984. Hingga akhir periode 1985-an pertumbuhan uang kuasi relatif diatas 20% dimana hal ini menunjukkan bahwa kebijakan deregulasi cukup efektif dalam memobilisasi dana-dana masyarakat.

Selama dekade 1990-an, pertumbuhan uang kuasi relatif berfluktuatif (Nasution, 1996, 28) menerangkan bahwa fluktuatif dana-dana masyarakat dalam sistem perbankan disebabkan karena ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi masih tergolong tinggi sehingga masyarakat cenderung untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk tunai. Hal ini ditunjukkan melalui angka pertumbuhan jumlah uang beredar dalam bentuk M1 yang kembali diatas 10% per tahunnya (tabel 2.2)

Setelah masa krisis tahun 1997, masyarakat cenderung untuk menyimpan kekayaannya dalam sistem keuangan nasional. Pertumbuhan jumlah uang beredar M1 riil cenderung mengalami tingkat yang negatif dibandingkan dengan pertumbuhan uang kuasi. Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2002, masyarakat masih cenderung untuk melihat peluang dalam melihat kekayaannya berdasarkan ekspektasi tingkat inflasi maupun perkembangan nilai tukar untuk memutuskan alokasi kekayaannya.

2.5. Sistem Keuangan di Indonesia

2.5.1. Industri Perbankan Nasional

Ditinjau dari porsi nilai aktiva dan porsi jumlah serta jaringan kantor cabangnya terhadap aktiva dan jumlah serta jaringan kantor cabang seluruh lembaga

keuangan, sistem keuangan Indonesia yang terpenting adalah adalah sistem perbankan (Nasution, 1990, 34).

Inti sistem keuangan di Indonesia adalah sistem perbankan dan inti dari sistem perbankan adalah bank-bank milik negara. Pada tabel 2.3 memberikan ilustrasi perkembangan perbankan dan sistem keuangan dari sebelum deregulasi transisi paska oktober 1988 yang dihitung hingga tahun 1990.

Dominasi sistem perbankan adalah sistem keuangan nasional mencerminkan tradisi pembelajaran yang sangat tergantung pada pembelanjaan tidak langsung berupa kredit perbankan. Pembelanjaan langsung berupa pengeluaran saham dan obligasi sebelum paket oktober 1988 masih relatif terbatas. Pada tabel 2.3 mengilustrasikan perkembangan-perkembangan lembaga keuangan.

Industri perbankan Indonesia berdasarkan data sebelum tahun 1990 terdiri dari satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, 7 bank milik negara (5 bank komersial dan masing-masing satu bank tabungan dan bank pembangunan), 27 Bank Pembangunan daerah, 10 kantor cabang bank asing, dan 68 bank swasta nasional (tabel 2.3). Berdasarkan tabel 2.3 terlihat perluasan struktur dan jaringan sistem keuangan setelah tahun 1988

TABEL 2.3
STRUKTUR DAN PERTUMBUHAN SEKTOR KEUANGAN
DI INDONESIA 1982-1990

	Jumlah			
	1982	1988	1989	1990
Bank Indonesia	1	1	1	1
Bank Komersial (<i>Deposit Money Banks</i>)	114	107	146	163
Bank Devisa Nasional (<i>National Forex Banks</i>)	15	17	23	28
Bank Asing (<i>Foreign Banks</i>)	11	11	22	26
Bank Komersial lainnya	60	51	72	80
Bank pembangunan ^{a)}	28	28	29	29
Lembaga Keuangan Bukan Bank	14	14	14	14
Bank Tabungan (<i>Savings Banks</i>)	83	106	131	129
Perusahaan Asuransi	17	83	101	122
Lembaga Kredit Lainnya	5080	5771	5812	5994
Jumlah	6040	6085	6198	6426

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia, berbagai edisi.

Keterangan: a) Termasuk 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Tabel 2.4 menggambarkan perkembangan aktiva disektor keuangan selama masa kebijakan deregulasi sektor keuangan. Bank komersial mengalami pertumbuhan jumlah dari sebesar 107 pada akhir tahun 1988 dan menjadi 146 bank komersial pada akhir tahun. Laju pertumbuhan setelah Pakto '88 mencapai 3,87%. Perkembangan serupa juga dialami oleh Bank Tabungan (*Savings Banks*) yang mengalami pertumbuhan hingga 14,7% per tahunnya. Aktiva Bruto pun mengalami peningkatan cukup tajam. Bank komersial sebelum Pakto '88 hanya mengalami pertumbuhan sekitar 18,9% per tahun, maka setelah tahun 1988 mencapai angka 42,8% per tahunnya.

Dampak paket kebijakan 1988 cukup kuat mempengaruhi struktur keuangan di Indonesia. Untuk pasar modal sendiri menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dengan terjadi peningkatan transaksi saham dari 24 transaksi pada akhir 1988 menjadi sebanyak 124 transaksi pada akhir tahun 1990. Pada periode yang sama, nilai saham yang terjual meningkat dari sebesar Rp 198 milyar menjadi Rp 13.144 milyar. Penjualan obligasi meningkat dari sebesar Rp 911 milyar menjadi sebesar Rp 1.862 milyar.

TABEL 2.4
PERTUMBUHAN AKTIVA SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA
1982-1990

	Jumlah			
	1982	1988	1989	1990
Bank Indonesia	13,7	42,5	40,1	15,6
Bank Komersial (<i>Deposit Money Banks</i>)	16,0	63,3	90,1	28,8
Bank Devisa Nasional (<i>National Forex Banks</i>)	12,7	50,1	71,4	28,4
Bank Asing (<i>Foreign Banks</i>)	1,2	5,2	5,2	27,6
Bank Komersial lainnya	0,7	6,3	6,3	37,4
Bank pembangunan ^{a)}	1,3	7,2	7,2	27,7
Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,8	3,1	3,9	24,3
Bank Tabungan (<i>Savings Banks</i>)	0,5	1,9	-	-
Perusahaan Asuransi	0,1	1,7	-	-
Lembaga Kredit Lainnya	0,09	0,6	-	-
Jumlah	31,6	115,5	-	-

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia, berbagai edisi.

Keterangan: a) Termasuk 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Perluasan struktur keuangan mempengaruhi perluasan terhadap dana-dana yang dihimpun disektor keuangan. Pada tabel 2.3 terlihat bahwa sejak diperkenalkannya paket kebijakan Oktober 1988, laju pertumbuhan kekayaan finansial semakin meningkat tajam. Hal ini menunjukkan bahwa trend perkembangan finansial dinegara-negara sedang berkembang selalu cenderung konvergen. Dominasi perbankan semacam ini di Indonesia terus berlangsung yang kemudian diikuti laju pertumbuhan aktiva industri perbankan.

2.5.2. Struktur Industri Perbankan

Selain Bank Indonesia, institusi terpenting lainnya dalam sistem perbankan nasional adalah bank-bank negara. Menurut rangkaian Undang-Undang tahun 1968 (versi lama), tentang pendirian masing-masing bank komersial milik pemerintah, setiap bank memiliki fungsi pokoknya masing-masing untuk melayani sektor perekonomian ataupun golongan nasabah tertentu. Paket kebijakan oktober 1988 cukup banyak merubah fungsi-fungsi tersebut menjadi terintegasi dan ini diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 tahun 1992. (Nasution, 1990;37)

Hingga awal tahun 1984 kegiatan komersial Bank Indonesia sangat menonjol dalam memberikan kredit langsung kepada berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kuasi BUMN berskala besar. Dominasi Bank Indonesia dalam sistem keuangan terlihat pada besarnya porsi aktiva. Namun berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992, Bank Indonesia merangkap peran ganda, yaitu disamping

sebagai *banking's bank* juga sebagai *lender of the last resort*.

Tabel 2.5

**Diversifikasi Pelayanan Bank-Bank Milik Pemerintah
(Sebelum Undang-Undang Tahun 1968)**

Nama Bank	Prioritas Pelayanan Dalam Sektor Ekonomi
Bank Ekspor Impor Indonesia	Produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor
Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Sektor koperasi, tani, dan nelayan dalam bidang pertanian, perikanan, kerajinan, perindustrian rakyat dan perusahaan rakyat, perdagangan kecil, dan pembangunan masyarakat desa
Bank Bumi Daya (BBD)	Perkebunan
Bank Dagang Negara (BDN)	Pertambangan
Bank Negara Indonesia 1946	Industri

Sumber : Bank Indonesia

Untuk menata kembali bank-bank swasta nasional paska transisi 1965, Bank Indonesia mengeluarkan rangkaian peraturan baru tentang perijinan, persyaratan modal, pengawasan dan pemeriksaan bank swasta. Ijin pendirian bank pasar dihentikan sejak Agustus 1970-an dan ijin pendirian bank umum swasta dihentikan mulai November 1973. Untuk memperkuat permodalan bank-bank yang telah ada diberikan anjuran dan insentif fiskal untuk merger.

Melalui jaringan pemilikan saham dan pimpinan usaha, masing-masing bank swasta nasional terikat dalam kelompok perusahaan tertentu. Pada umumnya, fungsi pokok dari bank dalam kelompok perusahaan adalah untuk memobilisir dana dari masyarakat guna membiayai pembelian kapital berbagai perusahaan non bank yang

menjadi anggota kelompoknya sendiri. Adanya resiko hubungan segitiga yang dampaknya cenderung menjembatani resiko jangka panjang perbankan nasional (Nasution, 1990, 41).

Bank asing mulai masuk kedalam tatanan perbankan di Indonesia sejak tahun 1968 setelah pemerintah orde baru membuka kembali kesempatan beroperasi pada bank-bank ini. Salah satu bank campuran yang ada adalah Pt. Bank Perdanania yang berdiri tahun 1956, dan merupakan usaha patungan antara modal Indonesia dan Jepang. Bank-bank asing terutama melayani perusahaan multi nasional dari negaranya dan perusahaan besar (*prime costumers*) dalam negeri serta merupakan jembatan dengan pasar uang internasional. Dibukanya kantor cabang bank asing juga bertindak sebagai agen kantor cabangnya yang berada diluar negeri bagi nasabah yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penerapan model universal banking paska deregulasi ekonomi 1983 di Indonesia berbeda dengan model yang diterapkan negara-negara lain. Bank simpan pinjam diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan bank komersial. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diperbolehkan melakukan tugas-tugas semi bank. Pemilik LKBB umumnya adalah pemegang saham yang tidak cukup besar total nilainya. Meski demikian, mereka sanggup mengumpulkan modal yang cukup besar untuk membiayai investasi. LKBB juga diberikan wewenang untuk berdagang valuta asing untuk memudahkan dalam melakukan strategi *go public*

Pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 mengubah semua bank

sebagai bank umum (Oppusungu, 1998, 21). Spesialisasi yang memisahkan bank komersial dan LKBB dihapuskan dan tidak ada lagi bank komersial yang hanya menitik-beratkan usahanya pada kegiatan komersial jangka pendek. LKBB difokuskan usahanya berdasarkan undang-undang tersebut pada masalah investasi. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 pada prinsipnya memperkuat pelaksanaan atau implementasi dari Pakto 1988 terhadap perluasan jaringan perbankan untuk struktur keuangan nasional.

Peraturan penyeragaman seluruh perbankan menjadi bank umum menghapus peran LKBB sebagai perantara (intermediasi). Namun, perluasan kegiatan yang sedemikian rupa dalam prakteknya akan menumbuhkan resiko kegiatan spekulatif yang beragam. Menurut Oppusungu (1998), kelemahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 adalah tidak menentukan dengan tegas batas-batas perbankan.

